

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis data pada bab terdahulu dapat disampaikan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Ada pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.
2. Ada pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.
3. Ada pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.
4. Ada pengaruh simultan variabel Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu:

1. Jumlah sampel yang terbatas hanya pada OPD Kabupaten Madiun saja, diharapkan pada penelitian lanjutan menambahkan jumlah obyek yang diteliti.
2. Variabel aksesibilitas hanya terbatas pada satu stakeholder saja yaitu pegawai Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Indikator aksesibilitas hampir sama dengan indikator transparansi laporan keuangan.
4. Penelitian ini memiliki hasil uji determinasi menunjukkan 91,2% sedangkan 8,8% lainnya dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian.

C. Saran

Saran yang dapat diberikan terkait dengan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Madiun

Untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas yang efektif, pemerintah dapat menggunakan berbagai media untuk mempublikasikan laporan keuangannya dan/atau menggunakan forum persewaan sehingga memudahkan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Bagi peneliti yang akan datang

- a. Penelitian berikutnya hendaknya dapat dikembangkan dengan menambahkan obyek tempat penelitian contohnya Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten se Jawa Timur.

- b. Diharapkan peneliti selanjutnya menambahkan sampel stakeholder laporan keuangan daerah, contohnya masyarakat.
- c. Peneliti berikutnya dapat menambahkan indikator dari penelitian yang lain, sehingga tidak terjadi lagi adanya kemiripan indikator pada variabel.
- d. Penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel lain yang mempunyai pengaruh kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, misalnya variabel penyusunan anggaran dan *value for money*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, Siti dan Nahar, Aida. 2012. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara". *Jurnal Akuntansi dan Auditing*. Vol. 8, No. 2, Mei 2012, pp. 137-150.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2003. *Pelayanan publik di Era Desentralisasi*. Deputi Bidang. Pulhamkan.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handri, Yulia Purnama, Dandes Rifa dan Novia Rahmawati. 2014. "Pengaruh Penyajian Laporan Posisi Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD (Penelitian Pada SKPD di Pemerintahan Kota Padang)". *Jurnal Fakultas Ekonomi*. Universitas Bung Hatta.
- Hehanussa, Salomi J. 2015. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon". *Jurnal, UNISSULA*.
- Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
- Kurniawati, Maria Magdalena Hesti. 2016. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember)", *Jurnal Mahasiswa*. Universitas Jember.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2001. *Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyana, Budi, 2006, “Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”, *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Vol.2 No.1, Mei 2006.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Rohman, Abdul. 2009. “Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah”. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 9, No. 1. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sagala, Marjuki. 2011. “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris di Kabupaten Samosir)”. *Skripsi Fakultas Ekonomi*, Universitas Sumatera Utara.
- Sande, Peggy. 2013. “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Provinsi Sumatra Barat)”. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Negeri Padang.
- Sari, Embun Widya. 2017. “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu”. *JOM Fekon*. Vol. 4, No. 1, Februari 2017.
- Somad, Abdus. 2016. “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang)”. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*. Universitas Kanjuruhan Malang.

Superdi. 2017. “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung)”. *JOM Fekon*. Vol. 4, No. 1, Februari 2017.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.